

## ANTI KORUPSI MELALUI KEARIFAN LOKAL

### A. PENGANTAR

Pada dasarnya bangsa Indonesia yang kita cintai ini dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi etiket dan moralitas kehidupan. Sudah jamak diketahui, peninggalan peradaban yang diwariskan nenek moyangnya, baik dalam bentuk peninggalan benda (*tangible*) dan tidak benda (*intangible*) menunjukkan hal itu. Bangsa Indonesia dalam catatan sejarah peradaban terabadikan sebagai bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai kegotongroyongan, keramah-tamahan, kemurnian insani, ketulusan nurani, kejujuran yang tinggi, dan nilai-nilai keadaban lainnya; sebagaimana terpatri dalam butir-butir nilai idiologi bangsa Pancasila dan UUD 45.

Dasar-dasar berbangsa dan bernegara yang dibangkitkan dari peradaban yang menghormati keniscayaan keberagaman (*bhinneka tunggal ika*), dan akar *humanism* yang menjunjung tinggi moralitas kemanusiaan yang luhur sebagai wujud prakerti karakter bangsa ini, semakin dijauhi dan “dimusuhi” anak zamannya. Tambahan perilaku yang bertentangan dengan nilai kejujuran yang sedang mendera dan menyandra bangsa dan tanah air Indonesia kini adalah Korupsi. Perilaku korup anak zaman ini kalau tidak segera diatasi, cepat atau lambat akan “menenggelamkan” bangsa Indonesia ke titik *nadir* terendah dalam kehidupan berbangsa. Catatan sejarah suram mencatat perilaku kotor ketidakjujuran; “mencuri milik negara dan hak-hak rakyat” untuk maksud memperkaya pribadi dan golongan di tengah kehidupan bangsa ini sedang merebak di mana-mana. Perilaku mereka yang korupsi, seperti dipertontonkan di media cetak dan elektronik, terkadang menyayat hati, bak tontonan sirkus dan sulap dengan berbagai atraksi serta terik-terik kamufase.

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Faktor penyebab korupsi itu ada 2 yaitu:

**a. Faktor Internal** merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Beberapa faktor yang ada dalam faktor internal ini, antara lain ialah:

**1. Sifat Tamak** merupakan sifat yang dimiliki manusia, di setiap harinya pasti manusia menginginkan kebutuhan yang lebih, akhirnya munculah sifat tamak ini di dalam diri seseorang untuk memiliki sesuatu yang lebih dengan cara korupsi.

**2. Gaya hidup konsumtif** ini dirasakan oleh manusia di dunia, manusia pasti memiliki kebutuhan masing masing dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus mengonsumsi kebutuhan tersebut, dengan perilaku tersebut tidak bisa di imbangi dengan pendapatan yang diperoleh yang akhirnya terjadilah tindak korupsi.

**b. faktor eksternal** Secara umum penyebab korupsi banyak juga dari faktor eksternal, faktor faktor tersebut antara lain :

**1. faktor politik** adalah salah satu faktor eksternal dalam terjadinya tindak korupsi. Di dalam sebuah politik akan ada terjadinya suatu persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Setiap manusia bersaing untuk mendapat kekuasaan lebih tinggi, dengan berbagai cara mereka lakukan untuk menduduki posisi tersebut. Akhirnya munculah tindak korupsi atau suap menyuap dalam mendapatkan kekuasaan.

**2. faktor hukum** adalah faktor eksternal lainnya dalam terjadinya tindak korupsi. Dapat kita ketahui di negara kita sendiri bahwa hukum sekarang tumpul ke atas lancip kebawah. Di hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah di terbukti bahwa banyak praktek praktek suap menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah.

**3. faktor ekonomi** ini sangat jelas sebagai penyebab terjadinya tindak korupsi. Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan apalagi dengan kebutuhan ekonomi itu sangatlah di pentingkan bagi manusia. Bahkan pemimpin ataupun penguasa berkesempatan jika mereka memiliki kekuasaan sangatlah ingin memenuhi kekayaan mereka. Akhirnya ketika ada peluang, mereka di dorong untuk melakukan korupsi.

**4. faktor organisasi** Faktor adalah faktor eksternal dari penyebab terjadinya korupsi. Di suatu tempat pasti ada sebuah organisasi yang berdiri, biasanya tindak korupsi yang terjadi dalam organisasi ini adalah kelemahan struktur organisasi, aturan aturan yang dinyatakan kurang baik, kemudian kurang adanya ketegasan dalam diri seorang pemimpin. Di dalam suatu struktur organisasi akan terjadi suatu tindak korupsi jika di dalam struktur tersebut belum adanya kejujuran dan kesadaran diri dari setiap pengurus maupun anggota.

Korupsi adalah musuh setiap bangsa dan negara. Korupsi telah menggagalkan berbagai program pembangunan, bahkan menenggelamkan rakyat pada jurang penderitaan yang paling dalam. Oleh karena itu, perlawanan terhadap segala bentuk korupsi menjadi agenda utama pada berbagai negara, juga termasuk Indonesia. Upaya serius pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi tampak dari semakin banyaknya kasus korupsi yang berhasil diangkat ke permukaan dan menjadi konsumsi publik melalui berbagai media massa.

Kaitannya dengan Pemberantasan Korupsi Pemerintah telah menunjuk Istansi-Istansi pemerintah sebagai sampel atau percontohan sebagai Instansi “ **Wilayah Bebas dari Korupsi** ” yang disingkat dengan WBK “. Sebagai salah satu jalan keluar harus ditempuh dan selalu diusahakan untuk memerangi korupsi yang dimulai melihat nilai-nilai kearifan lokal bangsa yang telah terbukti menjadi pekerti mulia dan pembentuk karakter moralitas bangsa pada zamannya. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang tumbuh dan lama melekat pada tradisi milik suku bangsa ini harus diangkat untuk dipelajari dan diapresiasi sebagai warisan luhur bangsa.

## **B. TRADISI-TRADISI LOKAL YANG ADA DI BALI DAN LOMBOK DALAM UPAYA MEMBERANTAS KORUPSI.**

### **a. Tradisi Matiti Suara di Bali**

Tradisi *Matiti Suara* di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali adalah tradisi yang sejak berabad-abad mendidik warga Desa Pakraman Batur, Kintamani agar berdedikasi mulia, berperilaku tulus dan ikhlas dalam mengabdikan diri untuk

kedamaian dan kesejahteraan lahir batin masyarakat banyak di desanya. Tradisi *Matiti Suara* ini berkaitan erat dengan rangkaian upacara *Ngusaba Kadasa* (seputar bulan April) yang dilakukan setiap setahun sekali oleh masyarakat Desa Pakraman Batur di Pura Kahyangan Jagat Pura Batur, Kintamani, Bangli. Mengingat tradisi *Matiti Suara*, sarat dengan nilai-nilai pendidikan yang dapat menjauhkan masyarakatnya dari keinginan curang ataupun korupsi saat mendedikasikan pengabdian diri pribadi untuk kemuliaan orang banyak, penting dipelajari. *Matiti Suara* merupakan upacara keagamaan yang berkaitan erat tentang pendidikan anti korupsi yang terdapat dalam ***Sarasamuscaya, Bagawadgita, dan Menawa Dharmasastra.***

Pentingnya pembangunan karakter anti-korupsi karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk bebas. Manusia memiliki kehendak bebas dan kebebasan untuk membangun eksistensinya sendiri, baik individu maupun sosial. Kehendak bebas dan kebebasan manusia yang mengalami puncaknya pada pendewaan intelektualitas dan rasionalitas menandai terjadinya eksplorasi dan eksploitasi pikiran tanpa batas. Akibatnya, manusia seringkali terseret dalam arus materialisme, hedonisme, dan pragmatisme. Perilaku korupsi menunjukkan kuatnya pesona materialisme yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat pragmatis. Hal ini dapat dijelaskan mengingat pikiran rasional memang bersifat liar, tidak pernah diam, penuh kegelisahan, penuh keinginan, seperti disebutkan dalam kitab ***Sarasamuccaya, 81***, sebagai berikut:

*Duragam bahudaghami prarathanasamsayatmakam,*

*Manah suniyatam yasya sukhi pretya vaha ca.*

*Nihan ta krama nikang manah, bhnanta lungha svabhawanya,*  
*akweh mangen-anganya, dadi prathana, dadi sangsaya,*  
*pinakawaknya, hana pwa wwang ikang wenang humeret manah, sira*  
*tika menggeh amanggih sukha, mangke ring paraloka kabeh.*

Artinya:

“Keadaan pikiran itu demikianlah tidak berkententuan jalannya, banyak yang dicita-citakannya, terkadang penuh kesangsian, demikianlah kenyataannya; jika ada orang dapat mengendalikan pikirannya, pasti orang itu memperoleh kebahagiaan, baik sekarang maupun di dunia yang lain”.

*Sloka* ini menegaskan bahwa pengendalian diri dimulai dari kesadaran untuk memahami pikiran yang liar sifatnya. Pikiran adalah sumber keinginan yang dapat muncul tiba-tiba, ibarat kuda yang bergerak ke segala arah. Pentingnya pikiran untuk dikendalikan karena pikiranlah yang berhubungan dengan objek-objek melalui indera (*indriya*). Sentuhan dengan objek duniawi ini menimbulkan bermacam-macam sensasi dan fenomena kejiwaan yang tercermin dalam setiap perbuatan manusia. Sensasi-sensasi inilah yang kemudian membelenggu Sang Diri (*Atman*) sehingga ia lupa (*aturu*) pada kesejatiannya. Oleh karena itu, pikiranlah yang harus dikendalikan terlebih dahulu dari keterikatan pada objek-objek inderawi sehingga ia menjadi pikiran yang berkesadaran (*consciousness mind*). Dalam kesadaran inilah, Sang Diri akan dapat menemukan kembali hakikat diri sejatinya (*matatur ikang atma ri jatinya*). Sebaliknya, Sang Diri yang kehilangan kesadaran justru akan terjebak pada sensasi-sensasi objek duniawi yang menjadikan dirinya budak *indriya*.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa *dharma* adalah landasan dalam memenuhi *kama* dan mendapatkan *artha*. Seseorang yang memperoleh segala sesuatu tanpa dilandasi dengan *dharma* sesungguhnya adalah pencuri. Hal ini sejalan dengan salah satu ajaran *Bhagavad Gita* (Bab III, 12), sebagai berikut.

*Istan bhogan hi vo deva, dasyante yajna bhavitah  
Tair dattan apradayaibhaya, yo bhukte stena eva sah*

Artinya:

Para Dewa mengurus berbagai kebutuhan hidup. Bila para dewa dipuaskan dengan pelaksanaan *yajna* (korban suci), mereka akan menyediakan segala kebutuhan untukmu. Tetapi orang yang menikmati berkat-berkat itu tanpa mempersembahkannya kepada para dewa sebagai balasan, sesungguhnya dia adalah pencuri.

Persembahan kepada para dewa adalah persembahan yang terbaik, yakni segala yang diperoleh dengan landasan *dharma*. Segala persembahan yang tidak diperoleh melalui jalan *dharma*, seperti uang hasil korupsi tentu bukanlah persembahan yang terbaik dan tidak akan diterima pahalanya.

Dalam hukum Hindu, konsep keadilan juga ditetapkan berdasarkan kedudukan dan kewenangan seseorang (*catur warna*). Seorang *sudra* yang melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan hukuman lebih rendah, dibandingkan dengan *waisya*, dan seterusnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *Manawa Dharmasastra*, 337, sebagai berikut.

*Astāpādyam tu çūdrasya steye bhawati kilbisam,  
sādaçaiwa tu waiçyasya dwātrimçat ksatriyasya ca.*

Artinya :

“Dalam hal pencurian, seorang sudra yang bersalah dihukum delapan kali lipat, *waisya* dengan enam belas kali lipat dan ksatria sebesar tiga puluh dua kali lipat.”

Penjelasan ini menegaskan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin tinggi pula hukuman yang akan diberlakukan kepadanya bila melakukan pelanggaran hukum. Mengingat mereka dipandang memiliki kualitas dan kompetensi yang lebih baik

dibandingkan masyarakat kebanyakan. Mereka yang semestinya menjadi teladan dan pengayom masyarakat, tetapi menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki dapat diberikan hukuman yang berat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa dalam Hindu tidak dikenal adanya pengistimewaan seseorang di mata hukum. Artinya, kasus yang mencederai keadilan hukum, seperti pencuri semangka yang dihukum kurungan selama enam bulan, sebaliknya koruptor bebas berkeliaran tidak akan terjadi dalam hukum Hindu.

### **b. Pendidikan Anti Korupsi di Lombok**

Nilai-nilai kearifan lokal dalam komunitas Sasak yang tinggi dan sangat cocok diterapkan dalam kehidupan dewasa ini dan di masa depan, terdapat dalam ungkapan bahasa yang dipegang teguh dalam pergaulan, yang berwujud peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat Sasak. Dalam komunitas Sasak diistilahkan dengan *sesenggak*. *Sesenggak*, yaitu ungkapan bahasa (tradisional) yang berbentuk peribahasa dan pepatah sebagai perekat pergaulan masyarakat Sasak. Dalam ajaran sesenggak banyak terkandung ajaran-ajaran dan nilai-nilai tradisional/kearifan tradisional, seperti mengajarkan tentang ketuhanan, pendidikan, moral, hukum dan sebagainya.

Kearifan lokal etnis Sasak sejak masa lampau mengandung nilai-nilai yang sangat luhur dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Memiliki relevansi dan makna yang untuk dijadikan sebagai roh dan nilai-nilai baru di era kekinian. Namun dewasa ini, nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur etnis Sasak itu telah mengalami pergeseran, mengalami kelunturan, dan seakan-akan kehilangan makna sesungguhnya. Mengingat kearifan lokal/kearifan tradisional suku Sasak sarat dengan nilai-nilai pendidikan yang dapat menjauhkan masyarakatnya dari keinginan curang ataupun korupsi saat mendedikasikan pengabdian diri pribadi untuk kemuliaan orang banyak, penting dipelajari. kearifan lokal/kearifan tradisional masyarakat Sasak di Lombok dengan kaitannya dengan pendidikan anti korupsi, peneliti pahami sebagai nilai kearifan bangsa yang pantut dikenal dan

diapresiasi, terlebih saat mana bangsa Indonesia sedang menghadapi teror korupsi yang dilakukan oleh anak bangsanya sendiri.

Beberapa ungkapan-ungkapan/sesenggak yang menggambarkan tentang upaya-upaya pemberantasan Korupsi, antara lain:

#### 1. *Patut Patuh Pacu*

Artinya:

*Patut* berarti benar, *Patuh* berarti sesuai dengan aturan, dan *Pacu* berarti bersungguh-sungguh. Jadi *Patut Patuh Pacu* memiliki arti segala sesuatu sikap, perbuatan atau perilaku dilakukan selalu berdasarkan aturan yang berlaku di masyarakat.

#### 2. *Aiq meneng, tunjung tilah, empaq bau*

Artinya:

Air/tetap jernih teratai/tetap utuh, ikan pun di dapat/tertangkap. mengandung makna bahwa dalam mengatasi dan menyelesaikan suatu perselisihan, diupayakan agar suasana tetap tenang, masyarakat tidak panik, lingkungan masyarakat tidak tertanggu, masalah atau perselisihan terselesaikan dengan damai

#### 3. *Tindih Maliq Merang*

Artinya:

Suatu perbuatan selektif dan berdasarkan etika moral, dalam berbicara, berperilaku, dan berpikir sesuai dengan tata karma kemanusiaan sehingga tidak menjadi manusia yang tulah manuh terhadap ajaran leluhur.

#### 4. *Maraq Begang lek Lumbung*

Artinya:

Maraq artinya seperti, Begang artinya tikus, dan lek Lumbung artinya di Lumbung. Hal ini menjelaskan bahwa kecurangan atau pemerasan yang dilakukan oleh seseorang/penguasa terhadap orang lain atau masyarakat dalam suatu kelompok organisasi atau suatu kelompok masyarakat. Adanya kesalahan dalam menjalankan kekuasaan dan

tanggungjawab akan memberikan dampak terhadap kebutuhan organisasi dalam mengelola keuangan. Dengan demikian *Maraq Begang lek Lumbung* menyiratkan bahwa adanya tikus (binatang pengerat) yang selalu memeras perekonomian masyarakat di dalam suatu organisasi atau kelompok yang dalam waktu lama menyebabkan kerugian. Hal ini membuktikan adanya korupsi terselubung yang dapat merugikan organisasi, masyarakat, bahkan negara.

### C. PENUTUP.

Mengingat kearifal lokal yang ada sarat dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dapat menjauhkan masyarakatnya dari keinginan curang ataupun korupsi, maka tradisi-tradisi lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ini sangat penting untuk disosialisasikan. Keinginan pemerintah untuk memberantas segala bentuk praktik korupsi sangat relevan dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang terdapat dalam tradisi-tradisi lokal pada masyarakat Bali dan masyarakat Lombok.

Korupsi yang berkembang dari sifat-sifat tamak manusia dan dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan manusia selanjutnya berkembang menjadi sifat-sifat curang, suap-menyuap, gratifikasi, penggelapan, dan berbagai sifat curang lainnya, telah ada penangkalnya dan terangkum dalam tradisi-tradisi lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi yang mulai mengakar dalam kehidupan masyarakat lebih luas, yaitu Indonesia.

Dan, sekedar untuk pertimbangan bahwa dalam memberantas Korupsi yang terjadi tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman kepada para pelaku kecurangan, namun terdapat hal yang lebih prinsip lagi yaitu dengan memberikan “Pendidikan yang Cerdas” sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korupsi adalah merupakan upaya yang luhur. Pendidikan Anti Korupsi telah terdapat dalam tradisi dan budaya luhur nenek moyang bangsa Indonesia, dan hal ini merupakan tindakan penting yang harus dilaksanakan oleh semua pihak.

